



PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN UNIT LAYANAN KEMASAN

Bella Safira¹, Hinfa Mosshananza², Aprilianto Amir³

¹Universitas Tulang Bawang, Indonesia

²Universitas Tulang Bawang, Indonesia

³Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 06, 23, 2025

Revised 07, 20, 2025

Accepted 08, 19, 2025

Kata Kunci:

Peran Pemerintah

Pemberdayaan UKM

Unit Layanan Kemasan.

ABSTRAK

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Namun, banyak pelaku UKM mengalami kendala dalam hal kualitas kemasan produk yang memengaruhi daya saing mereka di pasar modern. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM membentuk Unit Layanan Kemasan (ULK) sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan mutu kemasan dan *branding* produk UKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan ULK di Bandar Lampung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi dari Dinas Koperasi dan ULK serta pelaku UKM. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan Unit Layanan Kemasan (ULK), dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Unit Layanan Kemasan (ULK) berdampak positif terhadap pelaku UKM, khususnya dalam meningkatkan mutu kemasan, memperbaiki citra produk, serta memperluas akses pasar. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemerataan informasi kepada seluruh pelaku UKM, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pemberdayaan. Secara keseluruhan, program pemberdayaan Unit Layanan Kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung yang telah berjalan dengan cukup efektif. Keberlanjutan pada program ini diharapkan di masa yang akan datang mampu memperkuat

posisi UKM sebagai pilar ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



Corresponding Author:

Bella Safira

Universitas Tulang Bawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Indonesia

Email: safirabella115@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketika banyak produk impor masuk ke pasar dalam negeri, pemerintah daerah harus memberikan kontribusi nyata bagi UKM dalam mempertahankan produk yang sudah ada. UKM yang tumbuh di banyak daerah harus di kembangkan oleh pemerintah daerah karena merupakan salah satu kunci peningkatan perekonomian daerah. Peluang besar yang dimiliki sektor UKM sangat besar, dan UKM dapat mengatasi krisis dengan lebih baik. Sebelum krisis meletus pada tahun 1997, UKM kurang mendapat perhatian di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan banyak perusahaan besar tutup, namun sebagian besar UKM tetap bertahan, meski jumlahnya meningkat pesat (Niode, 2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) juga menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang mampu mengentaskan kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.

UKM juga menciptakan lapangan kerja lebih cepat dari pada industri lain, dan juga memberikan kontribusi penting untuk ekspor dan perdagangan. Semua jenis produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM memiliki kualitas (Hafsah, 2004). Hal tersebut karena keinginan mereka untuk dapat bersaing di pasar. Sekalipun

para pelaku usaha ini berada di level UKM, akan tetap mempertimbangkan aspek kualitas dan kuantitas sebelum memproduksi barang yang mereka produksi. Kondisi persaingan pasar merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan, mereka harus bersaing satu sama lain agar dapat menguntungkan pasar, belum lagi harus bersaing dengan perusahaan besar. Alasan para pelaku UKM mempertimbangkan kualitas dan kuantitas tentunya salah satunya karena adanya kesadaran terhadap konsumen dan calon konsumen, serta lebih selektif dalam mengambil keputusan pembelian (Mashuri 2019).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan. UKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dalam mendapatkan dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai wujud keberpihakan terhadap kelompok usaha ekonomi masyarakat (Amat dan Yusuf, 2024). Berdasarkan hal tersebut, UKM menjadi salah satu penopang terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di Bandar Lampung, berikut data jumlah UKM Bandar Lampung.

Tabel.1 Jumlah UKM Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah
1	2022	120.545
2	2023	120.234
3	2024	118.533

Sumber: *Online Data Sistem Dinas Koperasi dan UKM Lampung*

Pada tahun 2022 jumlah UKM Bandar Lampung naik dengan total 120.545 karena pada tahun 2022 adanya membangun jaringan dan kemitraan strategis karena itu merupakan langkah praktis untuk meningkatkan kinerja UKM. Pada tahun 2023 jumlah UKM menurun dengan total 120.234 alasan kenapa menurun adalah banyaknya persaingan dan tidak dapatnya masalah perizinan adanya kekurangan modal usaha. pada tahun 2024 jumlah UKM menurun drastis dengan total 118.533 dikarenakan kurangnya inovasi produk adanya kesulitan mengembangkan bisnis dan standar kualitas produk yang tidak konsisten.

Berdasarkan tabel di atas tersebut terdapat penurunan jumlah UKM di Bandar Lampung. UKM pada saat ini berada dalam krisis ekonomi bahkan dengan kondisi lebih parah dari krisis keuangan tahun 2022. Krisis akibat pandemi akan berpengaruh pada UKM dengan risiko serius yaitu lebih dari 50% UKM tidak akan bertahan beberapa bulan ke depan. Ambruknya UKM secara luas dapat berdampak kuat pada nasional ekonomi dan prospek pertumbuhan global, pada persepsi dan harapan, dan bahkan pada sektor keuangan, mengingat 60-70% lapangan kerja di perankan oleh UKM dan lebih dari itu terdapat tekanan oleh portofolio yang tidak memiliki kinerja. Kemunduran situasi keuangan UKM dapat memiliki efek sistemik pada sektor perbankan secara keseluruhan (Fajar 2016).

Peranan pemerintah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini Karena pemerintah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Farid, Antikowati, and Indrayati 2017). Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut maka dapat

dilaksanakan suatu kajian sebagai upaya serangkaian tindakan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Unit Layanan Kemasan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka program-program untuk UKM dan mengatasi hambatan-hambatan berupa keterbatasan modal, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pemasaran produk oleh kelompok usaha yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UKM. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran dinas koperasi dan UKM Bandar Lampung dalam pemberdayaan unit layanan kemasan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan UKM Unit Layanan Kemasan Pemerintah kota Bandar Lampung.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Charismana, Retnawati, and Dhewantoro 2022). Penelitian ini juga digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Sehingga akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Koperasi dan UKM sebagai Katalisator. Dalam konteks

pemberdayaan masyarakat, peran katalisator merujuk pada upaya pemerintah dalam membangkitkan kesadaran, menggugah semangat, dan mendorong transformasi sikap serta perilaku masyarakat agar mampu secara aktif dan mandiri mengembangkan potensinya. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menjalankan peran sebagai katalisator dengan berbagai cara, seperti pelatihan kewirausahaan, sosialisasi layanan Unit Layanan Kemasan (ULK), serta promosi produk UKM ke tingkat yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelatihan menjadi ujung tombak utama dalam strategi pemberdayaan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM tidak hanya terbatas pada teori kewirausahaan, tetapi mencakup aspek teknis seperti pengemasan produk, *branding*, desain visual, hingga strategi promosi melalui media digital. Pelatihan ini sangat berdampak positif terhadap pelaku usaha mikro, terutama mereka yang sebelumnya tidak menyadari pentingnya kemasan dalam menarik minat konsumen. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pelaku usaha seperti Ibu Riyani dan Ibu Santi. Sebelum mengikuti pelatihan, kemasan produk mereka masih sangat sederhana dan belum mencerminkan identitas produk secara kuat. Namun setelah mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh dinas, mereka mulai memahami bahwa kemasan bukan sekadar pembungkus, melainkan alat komunikasi visual antara produsen dan konsumen. Hal ini sejalan dengan pandangan Anwas (2014) bahwa pemberdayaan yang efektif adalah ketika masyarakat tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga pengetahuan dan kesadaran untuk mengembangkan diri.

Peran katalisator juga terlihat dalam aktivitas sosialisasi layanan Unit Layanan Kemasan (ULK). Dinas melakukan penyebaran informasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, forum UKM tingkat kecamatan, serta melalui perangkat kelurahan. Namun, efektivitas dari sosialisasi ini masih belum maksimal. Beberapa pelaku UKM yang diwawancarai

bahkan baru mengetahui keberadaan Unit Layanan Kemasan (ULK) setelah diajak menghadiri pelatihan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang harus dijumpai agar seluruh pelaku UKM, termasuk yang berada di wilayah pinggiran kota, mendapatkan akses informasi yang setara.

Penting dicatat bahwa peran katalisator juga mencakup aspek motivasi dan dorongan psikologis. Berdasarkan observasi lapangan, pelaku UKM yang telah mendapatkan layanan Unit Layanan Kemasan (ULK) merasa lebih percaya diri dalam memasarkan produknya. Kemasan yang menarik tidak hanya meningkatkan nilai jual, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih saat produk bersaing di pasar oleh-oleh atau ditampilkan dalam pameran. Di sinilah letak nilai strategis dari peran katalisator bukan hanya menyediakan pelatihan, tetapi juga menumbuhkan keberanian untuk berkembang.

Promosi produk dan layanan juga menjadi bagian penting dari peran ini. Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi pelaku UKM dalam mengikuti pameran, bazar, serta kegiatan ekspo baik tingkat lokal maupun nasional. Unit Layanan Kemasan (ULK) sendiri diposisikan tidak hanya sebagai tempat layanan teknis, tetapi juga sebagai simbol inovasi pemerintah daerah dalam mendampingi pelaku usaha kecil. Strategi ini sejalan dengan pendekatan *development through facilitation*, di mana keberhasilan pemberdayaan bukan hanya dilihat dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi dari seberapa besar masyarakat dapat berkembang secara mandiri.

Namun demikian, peran katalisator ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Hasil wawancara dengan pihak dinas menunjukkan bahwa keterbatasan SDM, anggaran promosi, dan rendahnya partisipasi aktif sebagian pelaku UKM masih menjadi hambatan. Dinas telah mencoba menjawab tantangan ini dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan, namun jangkauan dan intensitas kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Kritik terhadap pelaksanaan peran katalisator juga muncul dalam hal efektivitas pemetaan kebutuhan pelatihan. Beberapa pelaku UKM merasa bahwa pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik sektor usaha mereka. Oleh karena itu, dalam konteks teori *community-driven development*, seharusnya pelaku usaha diberikan ruang untuk menentukan topik dan format pelatihan yang relevan dengan tantangan aktual mereka di lapangan.

Dinas Koperasi dan UKM sebagai Fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas telah menyediakan berbagai fasilitas teknis untuk mendukung operasional Unit Layanan Kemasan (ULK). Fasilitas tersebut meliputi mesin cetak label, mesin *vacuum sealer*, komputer desain grafis, ruang pelatihan, serta tenaga desain profesional. Semua fasilitas ini ditujukan agar pelaku UKM dapat meningkatkan kualitas kemasan produk mereka tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli alat sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh pengelola ULK, seluruh peralatan dan ruang kerja disiapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pemberdayaan usaha kecil. Layanan desain diberikan secara gratis, dan pencetakan kemasan dikenakan biaya sangat ringan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fasilitasi tidak selalu identik dengan bantuan dana langsung, melainkan juga akses terhadap layanan yang berkualitas namun terjangkau.

Pelaku UKM seperti Ibu Riyani dan Ibu Santi mengaku sangat terbantu oleh layanan ini. Mereka sebelumnya tidak memiliki pemahaman dan alat untuk membuat kemasan yang menarik. Melalui ULK, mereka mendapatkan pendampingan personal mulai dari penentuan nama merek, pemilihan warna, desain label, hingga proses cetak dan pengemasan. Ini menunjukkan bahwa fasilitasi yang diberikan Dinas bersifat komprehensif, dari hulu hingga hilir proses *branding* produk. Selain dari aspek teknis, peran fasilitator juga terlihat dalam pendampingan akses permodalan. bantuan

pendanaan usaha terhadap Unit Layanan Kemasan (ULK), Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung secara bertahap telah memberikan dukungan pendanaan kepada Unit Layanan Kemasan (ULK), terutama melalui anggaran daerah (APBD). bantuan ini kami fokuskan untuk pengadaan atau peremajaan peralatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta operasional layanan kemasan itu sendiri.

Kemudian Dinas juga memfasilitasi akses sumber pembiayaan melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk pelaku UKM .meskipun Dinas Koperasi dan UKM sebenarnya tidak secara langsung memberikan dana hibah atau pinjaman tunai kepada pelaku UKM tapi Dinas berperan sebagai penghubung dan pendamping, untuk membantu pelaku UKM dalam menyiapkan persyaratan seperti legalitas usaha, laporan keuangan sederhana dan proposal usaha. Sehingga memudahkan para pelaku UKM agar usahanya lebih berkembang tanpa adanya kesulitan. Meski demikian, berdasarkan wawancara, belum semua pelaku UKM memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal. Ada yang sudah mengajukan pinjaman, dan ada yang belum mengajukan pinjaman meskipun sudah mengetahui adanya program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi bukan hanya tentang menyediakan akses, tetapi juga soal pendekatan aktif (proaktif) dari dinas untuk menjangkau pelaku usaha, memahami hambatan mereka, dan membantu menyusun strategi pengembangan usaha yang sesuai.

Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UKM juga tidak bekerja sendiri dalam menjalankan peran ini. Mereka menjalin kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perguruan tinggi, serta komunitas wirausaha. Misalnya, ada mahasiswa desain yang magang di Unit Layanan Kemasan (ULK) untuk membantu proses desain, serta lembaga pelatihan eksternal yang mengadakan *workshop* di lokasi Unit Layanan Kemasan (ULK). Kolaborasi lintas sektor ini merupakan bentuk nyata dari pendekatan

pentahelix, yang menggabungkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan peran fasilitator ini. Pertama, fasilitas Unit Layanan Kemasan (ULK) masih terpusat di satu lokasi sehingga menyulitkan pelaku usaha di wilayah kecamatan atau pinggiran kota. Kedua, kapasitas layanan Unit Layanan Kemasan (ULK) masih terbatas secara teknis misalnya hanya mampu mencetak dalam skala kecil hingga menengah. Ketiga, belum adanya sistem layanan daring yang memungkinkan pelaku UKM mengakses layanan dari jarak jauh.

Dinas Koperasi dan UKM sebagai Regulator. Peran regulator menempatkan pemerintah sebagai pihak yang merancang dan menetapkan kebijakan, aturan, dan standar pelaksanaan program pembangunan, termasuk di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menjalankan peran sebagai regulator melalui perencanaan strategis, penyusunan standar operasional layanan Unit Layanan Kemasan (ULK), serta pengawasan pelaksanaan program secara administratif dan fungsional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas telah menyusun berbagai dokumen perencanaan formal, seperti , Renstra (Rencana Strategis) Dinas, dan SK yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Kemasan (ULK). pemberdayaan UKM melalui inovasi kemasan dan penguatan *branding* lokal ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan sektor ekonomi kerakyatan. Dalam wawancara, pihak dinas menegaskan bahwa semua layanan di Unit Layanan Kemasan (ULK) dijalankan berdasarkan yang telah ditetapkan sesuai SK.

Prosedur layanan dimulai dari formulir permohonan desain, proses konsultasi dengan desainer, hingga pencatatan jumlah layanan yang telah diberikan kepada pelaku usaha. Setiap

bulan atau triwulan, pengelola Unit Layanan Kemasan (ULK) wajib menyampaikan laporan kinerja kepada dinas, yang kemudian dievaluasi dan dimasukkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola (*governance*) telah dijalankan secara sistematis. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan di level birokrasi dan pemahaman pelaku UKM di lapangan. Sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui bahwa ULK merupakan program resmi pemerintah daerah yang memiliki dasar hukum.

Bahkan beberapa pelaku usaha seperti Ibu Riyani dan Ibu Santi mengira bahwa Unit Layanan Kemasan (ULK) adalah jasa swasta atau unit bisnis mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan dokumen perencanaan telah tersedia, sosialisasi kebijakan belum berjalan optimal. Dalam konteks teori pemberdayaan berbasis kebijakan publik, sebuah kebijakan tidak akan efektif jika hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa pemahaman dan partisipasi dari masyarakat sebagai sasaran program. Di sisi lain, regulasi yang ada belum mencakup inovasi pelayanan ke depan. Misalnya, belum ada peraturan teknis atau pedoman untuk perluasan Unit Layanan Kemasan (ULK) ke wilayah kecamatan, pengembangan layanan digital (*online*), atau sistem subsidi desain untuk pelaku usaha pemula. Hal ini penting untuk menjawab tantangan layanan yang masih terpusat dan terbatas secara teknis.

Dalam wawancara dengan pengelola Unit Layanan Kemasan (ULK), Bapak Ferdinan menyatakan bahwa operasional ULK sepenuhnya mengikuti pedoman dari dinas. Namun, banyak pelaku UKM yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengakses layanan ini. Bahkan informasi dasar seperti prosedur layanan, jenis fasilitas yang tersedia, atau batasan layanan yang bisa diberikan belum seluruhnya dipahami oleh pengguna. Regulasi yang kuat seharusnya tidak hanya mengatur prosedur internal,

tetapi juga memperjelas hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai mitra pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi kebijakan yang lebih ramah, sederhana, dan partisipatif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembuatan *booklet* layanan ULK, infografis, atau video singkat edukatif yang disebarluaskan melalui media sosial, grup UKM, dan kantor kelurahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah memenuhi 3 aspek yaitu katalisator, fasilitator, dan regulator, dan sudah cukup efektif dilakukan. Dan dapat disimpulkan bahwa keberadaan Unit Layanan Kemasan (ULK) berdampak positif terhadap pelaku UKM, khususnya dalam meningkatkan mutu kemasan, memperbaiki citra produk, serta memperluas akses pasar.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan Unit Layanan Kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung yang telah berjalan dengan cukup efektif. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemerataan informasi kepada seluruh pelaku UKM, serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pemberdayaan. Keberlanjutan pada program ini diharapkan di masa yang akan datang mampu memperkuat posisi UKM sebagai pilar ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.

REFERENSI

Amat, L., & Yusuf, H. (2024). Analisis Perspektif Hukum Dagang Dalam

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1249-1264.

Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99-113.

Diva, G. (2009). Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta. Jakarta: Bakrie School of Management, 15-18.

Fajar, M. (2016). *UMKM di Indonesia: perspektif hukum ekonomi*. Pustaka Pelajar

Farid, M. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah. *Lentera Hukum*, 4, 97.

Hafsah, M. J. (2004). "Upaya Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah UKM." *Jurnal Infoskop 1 (Upaya pengembangan UKM)*: 1.

Kusumastuti, H., Rauf, E. U. T., & Mosshananza, H. (2025). Koordinasi Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Program Pasar Murah di Desa Bumi Aji Kabupaten Lampung Tengah. *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, 2(1), 29-34.

Mashuri, M. (2019). Analisis strategi pemasaran UMKM di era 4.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 215-224.

Naode, I. Y. (2008). Perkembangan Dan Strategi Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal FORMAS: Media Informasi & Komunikasi Ilmiah Mahasiswa-Masyarakat*, 1(4), 1-12.